

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 2

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak
Media Online	Media Nasional

Wilayah: Kabupaten Purbalingga

Silpa Besar Akibat Pencairan Klaim Penanganan Covid-19 di Akhir Tahun Anggaran

<https://www.medianasional.id/silpa-besar-akibat-pencairan-klaim-penanganan-covid-19-di-akhir-tahun-anggaran/>

Purbalingga, medianasional.id – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD tahun 2021 sempat menjadi sorotan sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Purbalingga. Hampir seluruh fraksi DPRD Purbalingga yang berjumlah 7 fraksi mempertanyakan Silpa 2021 yang ternyata lebih besar dibanding Silpa pada APBD 2020. Yakni Rp 179.575.632.903,- pada 2020 dan naik di tahun 2021 menjadi Rp. 224.246.511.372,-

Adanya SILPA sebesar Rp 224.246.511.372 pada 2021 disebabkan karena adanya realisasi pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) khususnya RSUD Goeteng Tarunadibrata dan RSUD Panti Nugroho yang bersumber dari klaim penanganan covid-19 tahun 2020 dan 2021 pada akhir tahun anggaran. Padahal pada saat penyusunan APBD Perubahan belum memasang target pendapatan yang bersumber dari klaim penanganan covid-19.

Hal itu dikatakan Asisten Pemerintahan dan Kesra R. Imam Wahyudi, SH, MSi yang mewakili Bupati Purbalingga saat menyampaikan jawaban Bupati Purbalingga atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga, Jumat (17/6).

“Adanya pemasukan pendapatan di akhir tahun anggaran menyebabkan dana tersebut belum bisa digunakan pada tahun berjalan dan menjadi SILPA,” jelasnya. Jawaban tersebut, lanjut Imam Wahyudi sekaligus sebagai jawaban bupati atas pandangan Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN dan Fraksi Persatuan Demokrat.

Sementara, terkait dengan prioritas penggunaan alokasi belanja daerah bahwa prioritas pembangunan 2021 diarahkan pada 5 prioritas yakni 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan proporsi 56%, 2. Pelayanan public sebesar 30%, 3. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk percepatan pembangunan wilayah sebesar 8%, 4. Prioritas pengembangan sumber daya lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dan 5. Pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan sebesar 1%.

Saran dan masukan yang disampaikan seluruh fraksi, lanjut bupati, pada prinsipnya bahwa pihaknya dapat menerima dan akan diperhatikan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan kedepan. “Lebih rinci dan teknis selanjutnya akan dibahas pada rapat komisi dan badan anggaran,” kata Imam Wahyudi.

Rapat Paripurna kali ini merupakan lanjutan dari Rapat paripurna Kamis (16/6) dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H. Aman Waliyudin. Rapat dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra R Imam Wahyudi yang mewakili Bupati, para wakil Ketua DPRD dan anggota serta para kepala OPD.

SUBBAGIAN HUMAS PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH